

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU

A. P. Parlindungan (Selanjutnya disebut A. P. Parlindungan III), 1989, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2006, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Cipta Jaya, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan 4, SinarGrafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Cetakan Kedua, Sinar Gafika, Jakarta.

Agus Santoso, 2012, *Hukum Moral & Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Budi Ispiyarso, 2002, *Hubungan Fungsional Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum terhadap Perkembangan Hukum Administrasi Negara*, dalam S.F Marbun dan kawan-kawan, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta.

Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Boedi Harsono (Selanjutnya disebut Boedi Harsono II), 1971, *Undang Undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jambatan, Djakarta.

\_\_\_\_\_, 2003, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya) Jilid 2*, Djambatan, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya) Jilid 1*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

E. Utrecht dan Moh. Saleh Jindang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Ikhtiar Baru, Jakarta.

Effendi Perangin-angin, 1994, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Edisi I, Cetakan 4, Jakarta.

J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Press, Jakarta.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung.

K. Wantjik Saleh, 1985, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 7, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, (Selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo I), 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2019, *Teori Hukum*, CV Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

Sulistiyowati Irianto dkk, 2012, *Kajian Sosio Legal*, Pustaka Lasaran, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Soetomo, 2004, *Pedoman Jual Beli Tanah, Peralihan Hak dan Sertifikat*, Universitas Brawijaya, Malang.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2014, *Hukum Agraris Kajian Komprehensif*, 1st ed, Kencana Prenadamedia, Jakarta.

Utrecht, 1975, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia Ichtar*, Jakarta.

Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-24, Pradnya Paramita, Jakarta.

Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta.

Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. JURNAL**

Eman Ramelan, 2000, *Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999*, Jurnal Yuridika, Vol. 1 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Isdiyana Kusuma Ayu, Benny Krestian Hirawanto, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia*, Jurnal Ketahanan Pangan, Fakultas Hukum UNISMA, Vol 2, No 2.

Iqbal, M dan Sumaryanto, 2007, *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat*, Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, 5(2).

Johan Nasution, 2016, *Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Al-HIKAM Vol. 3 No. 2.

Kusniati, R, 2013, *Analisis perlindungan hukum penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan*. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 6(2).

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah*



*Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jurnal Imu Hukum 16, no. 1.*

Tata Wijayanta, 2014, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2.

### **C. SKRIPSI DAN THESIS**

Fauzie Kamal Ismail, 2011, Tesis berjudul *Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

Nida Nur Hidayah, 2020, *Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Brebes*, Skripsi, Fakultas Hukum, UNIES, Semarang.

Muhammad Insan C. Pratama, , 2009, Skripsi, berjudul *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, Dan Pemberian

## Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah Yang Dilindungi

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan provinsi lainnya

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

### E. WEBSITE

Cara Pemecahan Sertifikat Tanah karena Warisan (hukumonline.com)

<http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html>

Kedudukan SKB Menteri dalam Peraturan Perundang-undangan (hukumonline.com)

Mengenal Hukum Waris dalam KHI dan KUHPerdara (hukumonline.com)

